

Daftar Pustaka

1. Buku

- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ahmad Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, cetakan kedua, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hulman Panjaitan. *Kumpulan kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya*. Kencana.2016.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1993.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan-perikatan pada Umumnya*, PT.Alumni, Bandung 1999.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2015),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991) .
- Frans SatriyoWicaksono, *Panduan lengkap membuat surat-surat kuasa*, Visi Media,

2009

- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Diana R. W. Napitupulu, I Dewa Ayu Widyani, *Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria*, BMP.UKI: DN-03-HA-H-II.2022.
- L.E.H. Rutten, dalam M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan (Dalam Teori dan Yurisprudensi)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012).
- Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.98

2. Peraturan Perundang-Undangan

R. Subekti, dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok

Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 .

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no.37 Tahun 1998 tentang PPAT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3. Jurnal

Sofyan Hadi & Tomy Michael, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2, Desember 2017.

I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi , I Made Dedy Priyanto, Kadek Sarna, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Apartemen* , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol 5 No.2,2017,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/2076>

Gusti Bagus Gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha ,Agus Sugiarto, *kedudukan hukum akta perjanjian pengikatan jual beli(ppjb) dalam transaksi jual beli tanah*, Jurnal Education and development, Vol.11 No.1 Edisi Januari 2023.

- Denise Elysia, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan Pada Kewajiban Pembayaran Utang, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 1 Mei 2019,
- Selamat Lumban Gaol, *Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2022
- Alfis Setyawan, *tinjauan yuridis penggunaan surat kuasa jual terhadap penjualan objek hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet*, *Jurnal Selat*, Volume. 4 Nomor. 1, Oktober 2016.
- Rosadi, Aulia Gumilang, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya*. *Jurnal Cendekia Hukum* 5, No. 2 (2020): 255.
- Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017,

4. Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2385 K/Pdt/2016.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. 2510 K/PDT/1991 tanggal 8 April 1993 yang dimuat di *Varia Peradilan Tahun IX* Nomor 104, bulan Mei 1994,
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 43 PK/Pdt/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 PK/Pdt/2016.
- Putusan nomor 247/Pdt.G/2017/PN Blb,
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014)